

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *QARD*
DALAM *SKIM* PINJAMAN TEKUN NASIONAL DI KOTA
BINTULU SARAWAK, MALAYSIA**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Amira Binti Wahab

NIM. C42215197



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amira Binti Wahab
NIM : C42215197
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Qard
Dalam Skim Pinjam TEKUN Nasional Di Kota
Bintulu Sarawak, Malaysia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juli 2019

Saya yang Menyatakan



Nur Amira Binti Wahab

NIM. C42215197

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Akad *Qard* Dalam *Skim* Pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia”, yang ditulis oleh Nur Amira Binti Wahab NIM C42215197 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juli 2019

Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Amira Binti Wahab NIM. C42215197 ini telah dipertahankan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

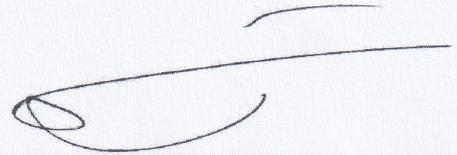
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



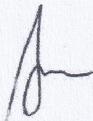
Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji II,



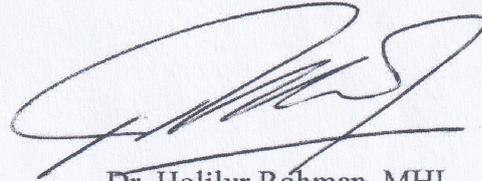
H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Saoki, SHI, MHI
NIP. 197404042007101004

Penguji IV,



Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 29 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Amira Binti Wahab
NIM : C42215197
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : amierawahab@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *QARD* DALAM SKIM PINJAMAN
TEKUN NASIONAL DI KOTA BINTULU SARAWAK MALAYSIA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis


Nur Amira Binti Wahab

Selain itu, pengusaha juga diminta untuk membayar bersama potongan biaya administrasi TEKUN sebanyak 4% dari nilai pinjaman setiap tahun selama pinjaman dijalankan. Potongan biaya administrasi tersebut haruslah dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan bayaran cicilan bulanan. Pengusaha juga diminta untuk memmbuat simpanan wajib sebanyak 5% dari nilai pinjaman setiap tahun. Simpanan ini juga haruslah dibuat bersama pembayaran pinjaman. Peminjam TEKUN juga akan mendapatkan perlindungan di bawah Insurans Pinjaman dan Insurans Hayat dan Kemalangan (peminjam) yang ditetapkan oleh TEKUN Nasional dalam jangka waktu pinjaman. Dari dokumen-dokumen pinjaman TEKUN mengungkapkan bahwa skim yang ditawarkan TEKUN menurut hukum Islam dikenali sebagai *qard*.

Dalam pinjaman TEKUN terdapat potongan 4% yang dinamakan sebagai potongan biaya administrasi. Biaya yang dikenakan keatas peminjam dianggap sebagai syarat wajib yang telah ditetapkan dalam pinjaman. Hal ini karena setiap pengusaha yang meminjam harus mengembalikan pinjaman dan biaya pengurusan tersebut. Pada prinsip asas akad *qard* yaitu prinsip *irfāq* (belas kasihan) yang tidak dibenarkan pengenaan biaya karena pinjaman. Maka pemberi pinjaman (TEKUN) tidak seharusnya mengenakan biaya pengurusan atau dalam hukum Islam dikenali sebagai *fee* atau *ujrah* atas pinjaman yang diberikan. Walau bagaimanapun, pihak pemberi pinjam (TEKUN) boleh mengenakan *fee* berasaskan kepada biaya sebenar jika ia boleh dibuktikan.

Dalam Majlis Syariah AAOIFI dan Majlis Fiqh Sedunia di bawah OIC (Persidangan Negara-negara Islam), mengeluarkan keputusan yang jelas dengan menyatakan bahwa kos bagi pengurusan hanya dibolehkan dengan syarat biaya itu adalah biaya tambahan pengurusan teknis sebenar. Apabila biaya tambahan yang dikenakan melebihi biaya yang sebenar, maka haram. Putusan Syariah AAOIFI ini adalah seiring dengan keputusan No.13 ayat (13) yang dikeluarkan oleh Majma Fiqh Al- Dawli atau Majlis Fatwa OIC. Ini bermakna sebarang biaya yang dikenakan harus berasaskan biaya pengurusan yang sebenar dan bukannya sekadar meletakkan persen seperti 1%, 2%, 3% daripada jumlah pinjaman. Inilah yang dikatakan riba karena manfaat yang diberikan bukan berdasarkan biaya pengurusan sebenar.

Biaya pengurusan yang dibenarkan dalam Majlis Fatwa OIC ialah biaya yang dikenakan berdasarkan biaya pengurusan yang sebenarnya tanpa terikat kepada nilai hutang peminjam. Jika kadar biaya perkhidmatan tersebut dikenakan bagi tujuan untuk menampung kos-kos pengurusan dan perbelanjaan tidak langsung seperti gaji pekerja, bayaran sewa bangunan dan seumpamanya itu tidak dibenarkan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul , “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *Qard* dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia” untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik akad *qard* dalam skim pinjaman

Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang menerapkan beberapa hal mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam ketika meminjam dan dalam pengembalian utangnya, dana Koperasi As-Sakinah berasal dari peputaran simpanan pokok, wajib dan manasuka.

Selain itu, tata cara peminjaman dan jaminan yang berupa jaminan pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Penyelesaiannya dengan cara memberikan surat tagihan maksimal tiga kali dan bekerja sama dengan Lembaga Sosial 'Aisyiyah untuk memberikan bantuan kepada *muqtarid* yang kurang mampu diperbolehkan dalam akad *qard* karena memberikan tangguh sampai berkelapangan. Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang akad *qard*. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek akad *qard* yaitu kredit macet di Koperasi As-Sakinah. Sedangkan, objek pada penelitian penulis pada akad *qard* dalam skim pinjaman TEKUN Nasional.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lona Edria Intan Subrata mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 dengan judul "Praktik Akad Utang Piutang Berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *qard* dalam Islam karena dalam syariat Islam ada menjelaskan bahwa tidak setiap tambahan hutang dapat dinyatakan

¹² Yushini Khadijah Matin, "Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

dalam kategori riba apabila tambahan tersebut tidak ada transaksi pengganti didalamnya. Sedangkan dalam praktik utang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras tersebut terdapat transaksi pengganti seperti hadiah pada setiap tahunnya dan sisa dari pembagian hadiah tersebut akan dibagi kembali kepada pihak peminjam. Maka dari praktik tersebut dapat dinyatakan bahwa bebas dari riba dan transaksi tersebut tidak dilarang dalam Islam. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang utang piutang yaitu akad *qard*. Perbedaannya pula adalah pada objek akad *qard* tersebut yaitu utang piutang berhadiah yang berlaku di Desa Sugihwaras. Sedangkan objek penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada akad *qard* dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Elnisa Salicha mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Qard* untuk Usaha Tambak Ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi *qard* yang digunakan di Desa Segoro Tambak tidak diperbolehkan karena transaksi ini mensyaratkan keuntungan atas pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur yakni pembagian keuntungan atas usaha tambak ikan pada pengembalian pinjaman debitur. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis

¹³ Lona Edria Intan Subrata, “Praktik Akad Utang Piutang Berhadiah di Desa Suguhwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Studi Analisis Hukum Islam)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yakni:

Bab pertama ini akan menjelaskan tentang pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang akad *qard* dalam hukum Islam dan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu akad pinjam meminjam (*qard*) dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia. Bab ini membahas tentang pengertian akad *qard*, dasar hukum akad *qard*, syarat dan rukun akad *qard*, macam-macam akad *qard*, hukum (ketetapan) *qard* dan berakhirnya akad *qard*. Bab ini juga membahas tentang latar belakang, visi misi, struktur keanggotaan, metode *istinbat* yang terdapat dalam Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dan fatwa pelaksanaan pinjaman (kos pengurusan) mengikut prinsip syariah.

Bab ketiga berisi data penelitian tentang praktik akad *qard* dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia. Memuat

gambaran umum tentang TEKUN Nasional meliputi sejarah berdirinya TEKUN Nasional, visi, misi, moto, struktur organisasi, produk skim pembiayaan, yang terdapat di TEKUN Nasional Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia. Penulis juga akan memberikan latar belakang mengenai akad pinjam meminjam yang, akad pinjam meminjam yang ditawarkan dalam sskim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia dan aplikasi akad *qard*.

Bab keempat berisi mengenai analisis akad *qard* dalam skim pinjaman TEKUN Nasional dan tinjauan hukum Islam terhadap akad *qard* dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia.

Bab kelima adalah penutup, berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran-saran dari hasil penelitian. Selain itu bab terakhir ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

- a) Qard- Al Hassan, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya qard al hassan ini sejalan dengan ketentuan Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah Gharim yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Dengan *qard al hassan* maka dapat membantu sekali orang-orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjam. Keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.
- b) Al-*qard* yaitu memberi sesuatu pinjaman kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjam.

5. Hukum (ketetapan) akad *qard*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qard* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan (*iqtarada*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda yang sejenis (gandum) kepada *muqrid* jika meminta zatnya. Jika *muqrid* tidak memintanya, *muqtariq* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qard* (barang yang

ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, *muqtariḍ* tidak memiliki *qarḍ* selama *qarḍ* masih ada.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa ketetapan *qarḍ*, sebagai mana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtariḍ* dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qarḍ*. Jika *muqtariḍ* meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika *qarḍ* telah berubah, *muqtariḍ* wajib memberikan benda-benda sejenis.

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qarḍ* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtariḍ* harus menyerahkan benda sejenis (*mitsli*) jika penukaran terjadi pada harta *mitsli* sebab lebih mendekati hak *muqriḍ*.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qarḍ* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarḍ*. Pertama, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qarḍ* pada sifatnya.

Menurut hukum *taklīfī*, hukum *qarḍ* menjadi terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Kesemua ahli anggota JFK ini tidak boleh melewati 3 tahun untuk setiap lantikan kecuali pengerusi dan mufti.

3. Metode *Istinbat* Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia

Menurut pada Perkara 14 Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Kebangsaan Agama Islam Malaysia, disebutkan bahwa tugas-tugas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan (JFK) adalah menimbang, memutuskan dan mengeluarkan fatwa atas apa-apa sahaja perkara yang berkenaan dengan agama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja.

Jawatankuasa ini akan memberikan pendapat-pendapatnya kepada Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) yang kemudian akan mengirimkan bersama-sama dengan rekomendasi kepada Majlis Raja-Raja.

Proses pengeluaran sesuatu fatwa di Malaysia hanya berlaku apabila Mesyuarat Majlis Raja-Raja memerintahkan supaya Jawatankuasa Fatwa MKI memberikan pendapat atau fatwa tentang sesuatu isu yang timbul dalam kalangan masyarakat Islam. Setiap isu yang dikemukakan akan dikaji serta disediakan satu kertas kerja yang berkaitan dengan isu yang ditimbulkan dan kemudian dibahas dalam Mesyuarat Jawatankuasa MKI.

balik dari 6 bulan sehingga 5 tahun. Potongan biaya administrasi yang dikenakan sebanyak 2% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pinjaman dikenakan dan simpanan wajib 5% daripada nilai pinjaman setiap tahun.

- 2) Program Pembangunan Usahawan Siswazah (PPUS), TEKUN juga menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan mahasiswa yang telah menamatkan pengajian atau telah bekerja dan berminat untuk memulakan bisnis tetapi masih kekurangan modal. Jumlah pinjaman diberikan dari RM1,000 sehingga RM50,000 dan tempoh bayaran balik dari 6 bulan sehingga 5 tahun. Potongan biaya administrasi yang dikenakan sebanyak 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pinjaman dikenakan dan simpanan wajib 5% daripada nilai pinjaman setiap tahun.
- 3) Program Pembiayaan Nelayan/ Pemasar, TEKUN menyediakan pinjaman untuk membantu golongan nelayan yang memerlukan modal bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti perikanan yang dirancang serta untuk membantu mengurangkan orang tengah melalui pengambil alihan hutang nelayan. Jumlah pinjaman yang diberikan sehingga RM50,000 dan tempoh bayaran balik 6 bulan sehingga 5 tahun. Potongan biaya administrasi yang dikenakan sebanyak 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang

tempoh pinjaman dikenakan dan simpanan wajib 5% daripada nilai pinjaman setiap tahun.

- 4) Skim Pembiayaan Usahawan Bekas Tentera (SPBT), TEKUN menyediakan program pinjaman untuk bekas anggota tentera dan juga isteri atau anak bekas tentera yang menceburi bidang bisnis dan kewirausahaan. Jumlah diberikan kepada bekas tentera yang pensiun dan tidak pensiun dari RM1,000 sehingga RM100,000 dan tempoh bayaran balik dari 6 bulan sehingga 10 tahun. Manakala, jumlah pinjaman yang diberikan untuk isteri dan anak di kalangan bekas tentera dari RM1,000 sehingga RM50,000 dan tempoh bayaran balik dari 6 bulan sehingga 5 tahun. Potongan biaya administrasi yang dikenakan sebanyak 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pinjaman dikenakan dan simpanan wajib 5% daripada nilai pinjaman setiap tahun.
- 5) Program Pembangunan Usahawan Profesional Muda Bumiputera, TEKUN menyediakan program pinjaman untuk menggalakkan golongan professional menceburi bidang bisnis yang mengamalkan (practice) atau menjalankan bisnis berlainan dari bidang kemahiran untuk memulakan bisnis atau sebagai modal tambahan untuk meningkatkan bisnis yang sudah sedia ada. Jumlah pinjaman yang diberikan dari RM1,000 sehingga RM100,000 dan tempoh bayaran balik dari 6 bulan sehingga 10 tahun. Potongan biaya administrasi yang dikenakan sebanyak 4% daripada nilai

B. Latar Belakang Akad Pinjam Meminjam Yang Ditetapkan Dalam Skim Pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia

Jika dilihat pada ciri-ciri yang terdapat dalam TEKUN, pihak TEKUN menggunakan *financial intermediary* (perantara keuangan) bagi menguruskan aliran uang dari pihak pemerintah kepada rakyat. Dana yang diperoleh oleh TEKUN merupakan dana yang berbentuk pinjaman oleh pemerintah dan perlu dibayar balik dalam tempoh jangka masa yang panjang tanpa adanya sebarang tambahan. Maka dana tersebut sudah menjadi hak milik TEKUN. Melalui dana pinjaman yang diberi oleh pemerintah, TEKUN menyalurkan pinjaman kepada rakyat dalam bentuk pembiayaan mikro yang mudah dan cepat.

Oleh karena pinjaman di TEKUN mudah dan cepat, banyak pengusaha terutamanya dari kalangan bumiputera lebih memilih untuk meminjam di TEKUN. Antara salah satu sebabnya karena di TEKUN tidak menggunakan apa-apa jaminan atau penjamin pinjaman sebagai syarat dalam pembiayaan di TEKUN.

Selain itu, pihak TEKUN juga ada menyediakan layanan bantuan dan dukungan dari sudut kursus dan peluang-peluang bisnes untuk meningkatkan kualitas bisnes-bisnes yang dijalankan oleh pengusaha. Disebabkan ini juga pengusaha lebih memilih meminjam di TEKUN Nasional.

Tujuan pihak TEKUN menggunakan konsep syariah yaitu akad pinjam meminjam (*qard*) dalam skim pinjaman TEKUN karena mayoritas pengusaha

Selain itu, menurut Majlis Syariah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan Majlis Fiqh Sedunia di bawah OIC (Persidangan Negara-negara Islam), mengeluarkan keputusan yang jelas dengan menyatakan bahwa setiap kos bagi pengurusan hanya dibolehkan dengan syarat biayatersebut adalah biayatambahan pengurusan teknis yang sebenar.

Jika potongan biaya administrasi yang dikenakan melebihi biaya yang sebenar maka hukumnya jatuh haram. Dari putusan AAOIFI ini adalah seiring dengan keputusan No.13 ayat (13) yang dikeluarkan oleh Majma Fiqh Al-Dawli atau Majlis Fatwa OIC. Ini bermakna sebarang biayayang dikenakan haruslah berasaskan potongan biaya administrasi yang sebenar dan bukannya sekadar meletakkan persen seperti 1%, 2%, 3%,4% daripada jumlah pinjaman. Inilah yang dikatakan riba karena tambahan yang diberikan bukan berdasarkan biayaperkhidmatan yang sebenar.

Potongan biaya administrasi yang dibenarkan dalam Majlis Fatwa OIC ialah biayayang dikenakan berdasarkan potongan biaya administrasi yang sebenarnya tanpa terikat kepada nilai hutang peminjam. Sebagai contoh, sekiranya kos pengurusan sebenar seperti fotocopy untuk borang dan dokumen-dokumen yang lain bagi setiap transaksi adalah sebanyak RM 100. Maka biayatersebut boleh dikenakan karena peminjam tanpa mengira jumlah atau nilai utang yang diberikan.

Dari wawancara penulis dengan pembantu pegawai pihak TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak menyatakan bahwa biaya 4% itu juga termasuk membayar sewa tempat pertemuan seperti adanya pertemuan mingguan pengusaha dengan pihak TEKUN. Dalam Piawaian Syariah AAOIFI bahwa kos sebenar tidak termasuk dalam perbelanjaan tidak langsung seperti kadar potongan biaya administrasi tersebut dikenakan bagi tujuan untuk menampung segala kos-kos pengurusan dan perbelanjaan secara tidak langsung seperti gaji pekerja, bayaran sewa bangunan dan seumpamanya itu tidak dibenarkan karena tidak menepati salah satu asas dan prinsip dalam *qard*.

Menurut Majlis Fatwa Antarabangsa setiap tambahan atau lebih daripada jumlah yang dipinjam dan dipersetujui atau disyaratkan di dalam kontrak ataupun dikenakan ketika kelewatan ketika membayar balik pinjaman sama ada dalam bentuk uang, barangan atau apa-apa manfaat lain dilarang adalah riba.

Secara asasnya potongan biaya administrasi adalah diharuskan karena bertujuan untuk menampung kos-kos pemprosesan pinjaman yang secara syaraknya ditanggung oleh peminjam. Namun, biaya yang dikenakan haruslah benar-benar mencerminkan kos sebenar. Oleh itu, potongan biaya administrasi yang dikenakan oleh pihak TEKUN haruslah dikaji dan dinilai semula karena setiap potongan biaya administrasi yang sebenar harus

- Jenis Skim Pinjaman, <https://www.tekun.gov.my/ms/#>, diakses pada 27 Maret 2019.
- Koperasi As-Sakinah ‘Asyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam”. Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Matin, Yushini Khadijah. “Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di
- Mohd Heykal, Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta:Prenada Media Group, 2010
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, t.t.
- Nawawi, Ismail *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Pasaribu, Chairuman *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Salicha, Elnisa. “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Qardh* untuk Usaha Tambak Ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*, Surabaya: Uinsa Press, 2014
- Subrata, Lona Edria Intan. “Praktik Akad Utang Piutang Berhadiah di Desa Suguhraras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Studi Analisis Hukum Islam)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Syarifuddin. Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Qadir, Abdurrachaman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yazid, Mohammad *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Wardi Muslich.Ahmad *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Wikipedia, TEKUN Nasional, dalam <https://ms.wikipedia.org/wiki/TEKUN>, diakses pada 25 Maret 2019

